

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	20

### BAB II TINJAUAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN RI

#### WILAYAH JABAR TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN

#### TINDAK PIDANA SIBER

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana .....	23
1. Pengertian dan konsep Sistem Peradilan Pidana .....	23
2. Asas dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	27
3. Tahap-tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia .....	31

B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelesaian .....	38
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana.....	49
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	52
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber .....	59

**BAB III TINJAUAN LANDASAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

A. Landasan Hukum Kepolisian.....	65
B. Peran dan Tanggung Jawab Polda Jabar dalam kasus Tindak Pidana Siber.....	73

**BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Landasan hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana siber di wilayah Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	79
--	----

B. Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian atas tindak pidana siber dalam penanganan kasus kejahatan asusila di media sosial Daerah Jawa Barat di wilayah Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	92
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	103

<b>PUSTAKA ACUAN .....</b>	<b>105</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara *Cyber Crime* di Subdit V Siber Polda Jabar ..... 74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	.....	97
------------	-------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2. Berita Acara Wawancara
- Lampiran 3. Berita Acara Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4. Surat Keterangan Persetujuan Publikasi